



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Februari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)
UNIT KERJA : SEKRETARIAT UTAMA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ATQO MARDIYANTO
2. Jabatan : SEKRETARIS UTAMA
3. NHK : 65447

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 2.650.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 315 m²/110 m² di KAB / KOTA GOWA, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 1405 m²/300 m² di KAB / KOTA WONOSOBO, HASIL SENDIRI Rp. 950.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 328 m²/120 m² di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
4. Tanah Seluas 3500 m² di KAB / KOTA GOWA, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 36 m²/36 m² di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 425.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 36 m²/36 m² di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 425.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**Rp. 370.000.000**

1. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT JEEP Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 270.000.000
2. MOBIL, MIRAGE SEDAN Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA**Rp. 145.000.000****D. SURAT BERHARGA****Rp. ----****E. KAS DAN SETARA KAS****Rp. 518.970.319****F. HARTA LAINNYA****Rp. 40.000.000****Sub Total****Rp. 3.723.970.319**



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 3.723.970.319

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.